Korupsi

Catatan

KOMISI Pemerantasan Korupsi (KPK) bersama Polda Kalimantan Barat dan BPK melangsungkan pertemuan, mendalami dua kasus korupsi dengan nilai miliaran rupiah di Kabupaten Bengkayang dan Melawi.

Penyelidikan dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada kepala desa dari APBD Tahun Anggaran 2017 senilai Rp20 miliar. Di Kabupaten Melawi, penyidik hukum menyelami penggunaan anggaran APBD Tahun 2012-2015 untuk pembangunan Masjid Agung Melawi, senilai Rp13 miliar.

Tentunya, kasus ini akan menambah daftar panjang kasus korupsi di Provinsi Kalimantan Barat dalam penggunaan anggaran.

Mencegah terjadinya penyimpangan hingga korupsi anggaran pemerintah (APBD), memang tidak mudah. Namun, bukan tidak bisa dilakukan. Asal kuasa pengguna anggaran memahami tata kelola anggaran yang baik dan berintegritas.

Di Kalimantan Barat, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono menyatakan ada empat kabupaten memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WPD).

BPK sebagai auditor pemeriksa penggunaan uang negara, mengulurkan bantuan dalam menciptakan tata kelola anggaran yang baik. Lagi-lagi, uluran tangan itu disambut dingin.
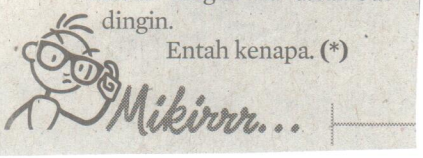
Entah kenapa. (*)